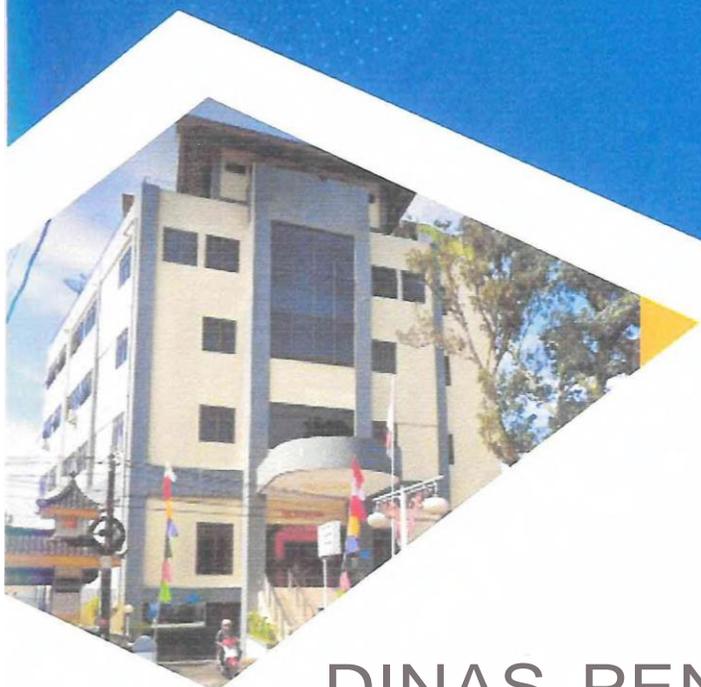




# RENCANA KERJA

TAHUN 2024



DINAS PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN TEMANGGUNG

**HALAMAN VERIFIKASI**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DINAS PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024**

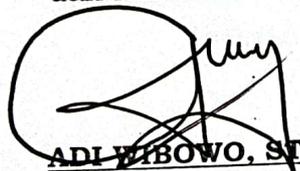
Disusun oleh :

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)  
DINAS PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator

Pada Tanggal : 3 Juli 2023

Koordinator  
Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam,  
dan Infrastruktur



**ADI WIBOWO, ST**

NIP. 19811101 200903 1 003

Petugas Verifikator



**DWI FATMA A., SE, M.Ec.Dev**  
NIP. 19810619 200501 2 016

Mengetahui  
**KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN TEMANGGUNG,**



**DWI SUKARMEI, ST, MT**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19740508 200312 1 008

**KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Pemerintah Dinas Penanaman Modal dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal Tahun 2024. Renja Dinas Penanaman Modal Tahun 2024 telah disusun berdasarkan Indikasi Rencana Program Strategis Perencanaan Kabupaten Temanggung pada Tahun Anggaran 2024.

Rencana Kerja ( Renja ) ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan arah dan landasan berpijak bagi seluruh penyelenggara tugas – tugas pembangunan mulai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
2. Memberikan pedoman dan acuan ( guideline ) bagi pengukuran kemajuan pelaksanaan tugas – tugas penyelenggaraan pembangunan.
3. Merupakan petunjuk operasional bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih mikro yang diselenggarakan oleh segenap OPD termasuk Dinas Penanaman Modal.

Semoga Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Penanaman Modal Tahun 2024 bisa menjadi sebuah Dokumen Perencanaan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi penyelenggara tugas – tugas pembangunan, sekaligus merupakan perwujudan amanat yang diemban oleh Kabupaten Temanggung dan Dinas Penanaman Modal.

Temanggung, 3 Juli 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal  
Kabupaten Temanggung



**MANDA KARTIKO, S.STP, M.Kom.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19790412 199711 1 002

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

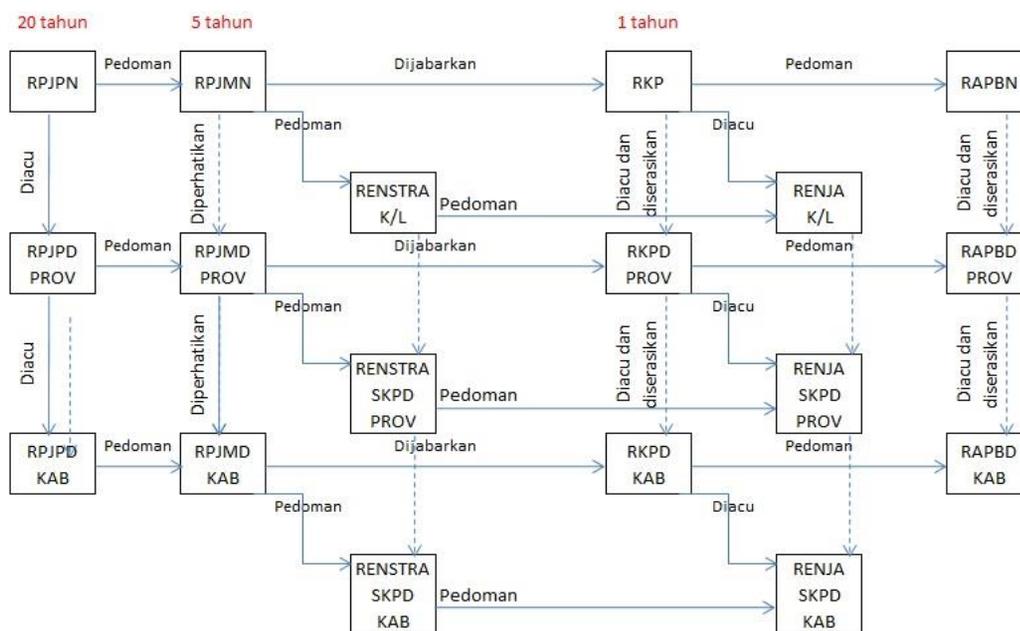
RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah, serta rencana pendanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Perubahan renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sesuai dengan jangka waktu RPD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2024 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2024.

Renja Dinas Penanaman Modal Tahun 2024 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinas Penanaman Modal Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1  
**Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan**

Renja Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung Tahun 2024 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

**a. Pengolahan data dan informasi;**

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dinas Penanaman Modal, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPDP. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Dinas Penanaman Modal, yang menyangkut aspek:

- 1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Penanaman Modal;
- 2) Kondisi pelayanan Dinas Penanaman Modal;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal;
- 4) Data Pokok Pembangunan Dinas Penanaman Modal;
- 5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Dinas Penanaman Modal;

- 6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
- 7) Informasi lain terkait pelayanan Dinas Penanaman Modal.

**b. Analisis gambaran pelayanan Dinas Penanaman Modal;**

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Dinas Penanaman Modal untuk kondisi tahun 2024-2026;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan I tahun 2023, dan perkiraan realisasi tahun 2023 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2023;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Dinas Penanaman Modal.

**c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal tahun lalu berdasarkan renstra Dinas Penanaman Modal;**

*Review* hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

*Mereview* faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

*Review* capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;

- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra Dinas Penanaman Modal;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan renstra Dinas Penanaman Modal;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja renstra Dinas Penanaman Modal sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

**d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal;**

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinas Penanaman Modal.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Penanaman Modal;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Penanaman Modal;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

**e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;**

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Dinas Penanaman Modal.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

**f. Perumusan tujuan dan sasaran;**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Penanaman Modal.

**g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;**

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayananserta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Dinas Penanaman Modal. Namun dalam proses ini Dinas Penanaman Modal mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

**h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;**

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting

terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dalam pembangunan daerah.

**i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Dinas Penanaman Modal;**

Penyusunan dokumen rancangan Renja Dinas Penanaman Modal merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

**j. Telaahan Kebijakan Nasional;**

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

**k. Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Penanaman Modal;**

Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Penanaman Modal perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

**l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan**

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

**m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.**

Dokumen rancangan Renja Dinas Penanaman Modal yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

## **1.2. Landasan Hukum**

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2024;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2024;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Renja Dinas Penanaman Modal Tahun 2024 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal untuk

Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinas Penanaman Modal Tahun 2024 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2024;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal Tahun 2024;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal Tahun 2024; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal Tahun 2024.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Dinas Penanaman Modal Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Dinas Penanaman Modal

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

**BAB II****EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENANAMAN MODAL****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal Tahun 2019-2023**

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal Tahun 2024, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal Tahun 2022 terhadap capaian Renstra Dinas Penanaman Modal Tahun 2018-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2023.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Penanaman Modal sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2022 dan Triwulan I Tahun 2023 terhadap target di Tahun 2023.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Dinas Penanaman Modal Tahun 2018-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2022 sebagai tahun ke-empat pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal 2018-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal  
s.d Tahun 2022

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Akhir				Target 2022				Realisasi per Triwulan Th. 2022								Realisasi		Capaian		Realisasi		Capaian		Ket																													
				Renstra (2023)		s/d 2021		K		Rp (RENJA)		Rp (DPA)		I		II		III		IV		2022		2022		s/d 2022			s/d 2022																												
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.																											
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	28																														
A	<b>PENANAMAN MODAL</b>				-				1,312,589,200	2,529,324,400		82,355,451		226,760,378	3	539,373,730	1	283,479,224		1,219,397,073																																					
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal				-				100,000,000	75,000,000		6,406,982		2,425,000		46,642,000	1	15,056,500	1	70,530,482																																					
		Nilai Realisasi Investasi	M	625					520			488.36		466.01		581.84		299.8		1,836.01																																					
		Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi	%	10					10			28.32		28.32		28.32		28.32		28																																					
		Persentase Ketersediaan SDM bidang PM dan Perizinan yang terlatih	%	100					100			48		48		85		100		100																																					
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Terselenggaranya Kegiatan Forum Investasi Berbasis Kewilayahan dan produk unggulan	Kegiatan						1	100,000,000	75,000,000		6,406,982		2,425,000		46,642,000	1.00	15,056,500	1	70,530,482																																				
		Tersusunnya raperda Penanaman Modal	raperda						1							1			1																																						
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program A1 (%)																					100																																				
Predikat																					Sangat Rendah																																				
2	Program Promosi Penanaman Modal								110,000,000	290,000,000		3,892,130		49,385,969	3	148,522,914				289,229,303																																					
		Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan	%	100					100			100		100		100		100		100																																					
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya sosialisasi kebijakan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha dan Peraturan Perizinan	Kegiatan						1	110,000,000	290,000,000		3,892,130		49,385,969	0	148,522,914	1	87,428,290	1	289,229,303																																				

RENJA 2024 | DINAS PENANAMAN MODAL

		Terpublikasinya Informasi Investasi di luar pameran					4					3				1		4		100					
		Terselenggaranya Matchmaking dan promosi serta informasi investasi	Kegiatan				4		0		1		3				4			100					
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program A2 (%)																				100					
Predikat																				Sangat Rendah					
3	Program Pelayanan Penanaman Modal						-	402,589,200	1,799,629,400		52,358,839		93,905,809		253,105,716		148,958,839	124	548,329,203		30.47				
		Persentase pelayanan perizinan online	%	100			100		100		98.69		98.15		98.34		98.34	-		92.21	-				
		Persentase perizinan yang bebas calo	%	100			100		100		100		100		100		100	-		100	-				
		Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu	%	95			95		100		100		100		100		100	-		100	-				
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha secara Elektronik	Tercukupinya Sarana dan Prasarana Perizinan	Kegiatan				1		0		0							-							
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	Bulan				12	382,589,200	1,789,629,400	3	51,573,839	3	90,986,209	3	249,567,096	3	146,439,139	12	538,566,283	100	30.09				
		Terlaksananya Percepatan Pelayanan Perizinan satu pintu	bulan				12			3		3		3		3		12		100					
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Terselesaikannya pengaduan dan gugatan di pengadilan	%				100	20,000,000	10,000,000	25	785,000	25	2,919,600	25	3,538,620	25	2,519,700	100	9,762,920	100	97.63				
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program A3 (%)																				75					
Predikat																				Sangat Tinggi					
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal							700,000,000	364,695,000		19,697,500		81,043,600		91,103,100		119,463,885	-	311,308,085		85.36				
		Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan	%	100			100		0		100		100		100		100	-		100	-				
		Persentase Pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%	100			100		100		100		100		100		100	-		100	-				
		Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan	%	100			100		100		100		100		100		100	-		100	-				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya pemantauan Penanaman Modal	bulan				0	125,000,000	-																

RENJA 2024 | DINAS PENANAMAN MODAL

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	terlaksananya BIMTEK/ Sosialisasi Kemudahan Berusaha Berbasis Resiko	Kegiatan				10	399,999,700	295,200,000	3	19,697,500	3	79,508,600	1	86,544,100	3	104,834,885	10	290,585,085	100	98.44				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Pengawasan Penanaman Modal	bulan				12	175,000,300	69,495,000	3		3	1,535,000	3	4,559,000	3	14,629,000	12	20,723,000	100	29.82				
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program A4 (%)																				100					
Predikat																				Sangat Rendah					
<b>B</b>	<b>PENDUKUNG URUSAN PERANGKAT DAERAH</b>						100	4,292,487,800	3,503,436,590		708,476,558	25	841,368,367	43	937,284,319	36	813,966,727	-	3,301,095,971	100	94.22				
<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						100	4,292,487,800	3,503,436,590		708,476,558	25	841,368,367	43	937,284,319	36	813,966,727	24	3,301,095,971	100	94.22				
		Tersedianya administrasi Keuangan, Umum dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	%	100			100			25		25		25	937,284,319	25	813,966,727	100	3,228,353,081	100					
	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>							3,000,000	-		-														
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi	Dokumen				33	3,000,000	-	10		8		9		6		33	-	100	-				
	<b>Administrasi Keuangan</b>							3,395,257,000	2,524,139,790		544,382,610		622,792,617	3	629,148,493	3	545,844,476		2,342,168,196						
<b>a</b>	<b>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>	Terpenuhiya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	bulan				14			3		5		3		3		14		100					
		Terbayarnya Insentif Pungutan Retribusi	bulan				12	3,395,257,000	2,524,139,790		544,382,610		622,792,617		629,148,493		545,844,476		2,342,168,196		100	92.79			
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>							-	275,992,000		39,693,500		76,300,001	4	127,031,500	-	13,597,233		256,622,234		93	-			
	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan		kegiatan				10	-	275,992,000	2	39,693,500	4	76,300,001	4	127,031,500	0	13,597,233	10	256,622,234	100	92.98				
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>							175,000,000	117,074,000		9,893,000		27,865,000	15	39,518,000	15	39,391,600		116,667,600		99.65	-			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat penerangan listrik	bulan				12	5,000,000	5,000,000	3	0	3	418,000	3	4,524,500	3		12	4,942,500	100	98.85				
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya ATK	bulan				12	40,000,000	20,000,000	3	2,545,000	3	5,143,500	3	9,098,500	3	3,131,000	12	19,918,000	100	99.59				
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tercukupinya barang cetakan dan penggandaan	bulan				12	55,000,000	57,000,000	3	3,781,000	3	10,406,500	3	10,841,500	3	31,738,100	12	56,767,100	100	99.59				
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tercukupinya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai	bulan				12	25,000,000	5,074,000	3	0	3	1,113,000	3	2,588,500	3	1,362,500	12	5,064,000	100	99.80				

RENJA 2024 | DINAS PENANAMAN MODAL

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terfasilitasinya perjalanan dinas luar daerah	bulan			12	50,000,000	30,000,000	3	3,567,000	3	10,784,000	3	12,465,000	3	3,160,000	12	29,976,000	100	99.92				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							75,326,000								72,742,890		72,742,890		96.57				
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Laptop	unit			3		40,326,000						3		38,445,000	3	38,445,000	100	95.34				
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Terlaksananya Pengadaan Aplikasi KSWPD	unit			1		35,000,000						1		34,297,890	1	34,297,890	100	97.99				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						541,230,800	521,230,800		112,638,948		102,917,999	12	115,074,074	12	118,019,998		448,651,019		86.08				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terfasilitasinya perjalanan dinas dalam daerah	bulan			12	3,000,000	3,000,000	3	0	3	250,000	3	1,950,000	3	650,000	12	2,850,000	100	95.00				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, SDA, Listrik dan Internet	bulan			12	100,000,000	90,000,000	3	17,056,592	3	15,711,988	3	13,959,563	3	15,657,487	12	62,385,630	100	69.32				
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terbayarnya jasa servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan			12	20,000,000	10,000,000	3	1,025,000	3	1,970,000	3	5,680,000	3	1,200,000	12	9,875,000	100	98.75				
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya honor Supporting Staff	bulan			12	418,230,800	418,230,800	3	94,557,356	3	84,986,011	3	93,484,511	3	100,512,511	12	373,540,389	100	89.31				
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor		bulan	12	3	3	3			3		12		100											
Terbayarnya Jasa Pengamanan Gedung/Kantor		bulan	12	3	3	3			12		100													
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						178,000,000	65,000,000		1,868,500	9	11,492,750	9	26,512,252	6	24,370,530	24	64,244,032		98.84				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terbayarnya jasa servis kendaraan & pembayaran pajak kendaraan	bulan			12	60,000,000	55,000,000	3	1,868,500	3	8,261,250	3	26,512,252	3	17,760,530	12	54,402,532	100	98.91				
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	bulan			0	100,000,000	-	0															
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Peralatan gedung kantor	bulan			12	18,000,000	10,000,000	3	-	3	3,231,500	3	-	3	6,610,000	12	9,841,500	100	98.42				
Terpeliharanya Perlengkapan gedung kantor		bulan	12	3	3	3			12		100													
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program B1 (%)																			100.00					
Predikat																			Tinggi					
JUMLAH							5,605,077,000	6,032,760,990		790,832,009		1,068,128,745		1,476,658,049		813,966,727		4,520,493,044		74.93				#DIV/0!
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH																			95.00	74.93				0.00
Predikat																			Sedang					
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH																			99.29					0.00
Predikat																			Akan Tercapai					

Tabel 2.2  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal  
s.d Triwulan I Tahun 2023

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Akhir		Realisasi		Target 2023			Realisasi per Triwulan Th. 2023								Realisasi		Capaian		Realisasi		Capaian		Ket.
				Renstra (2023)	s/d 2022	s/d 2022		I		II		III		IV		2023		2023		s/d 2023		s/d 2023					
	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	28
A	<b>PENANAMAN MODAL</b>				-				1,264,629,400	753,107,200		106,546,139								106,546,139							
1	<b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>				-				150,000,000	25,000,000		2,075,800							-	2,075,800		8.30					
		Nilai Realisasi Investasi	M	625				520			544.58								545	-	104.727						
		Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi	%	10				10			28.32								28	-	283.2						
		Persentase Ketersediaan SDM bidang PM dan Perizinan yang terlihat	%	100				100			100								100	-	100						
	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota</b>								75,000,000	20,000,000		454,800								454,800							
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Terselenggaranya Kegiatan Forum Investasi Berbasis Kewilayahan dan produk unggulan	Kegiatan					1	75,000,000	20,000,000	0.00	454,800							-	454,800	0						
	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>								75,000,000	5,000,000	-	1,621,000							-	1,621,000							
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Tersedianya Kajian Potensi Investasi	Dokumen					1	75,000,000	5,000,000	0.00	1,621,000							-	1,621,000	0						
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program A1 (%)																				0							
Predikat																				Sangat Rendah							
2	<b>Program Promosi Penanaman Modal</b>								320,000,000	5,000,000	-	920,000							-	920,000		18.40					
		Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan	%	100				100			100								100	-	100	-					
	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi</b>								410,000,000	8,000,000	-	920,000							-	920,000							







RENJA 2024 | DINAS PENANAMAN MODAL

		Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	bulan					12			3						3		25					
		Terbayarnya Jasa Pengamanan Gedung/Kantor	bulan					12			3						3		25					
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								130,000,000	92,499,900		3,634,650					-	3,634,650	3.93					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terbayarnya jasa servis kendaraan & pembayaran pajak kendaraan	bulan					12	45,000,000	45,000,000	3	3,634,650					3	3,634,650	25	8.08				
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	bulan					12	75,000,000	37,500,000	3	0					3	-	25	-				
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Peralatan gedung kantor	bulan					12	10,000,000	9,999,900	3	-					3	-	25	-				
		Terpeliharanya Perlengkapan gedung kantor	bulan				12	3			3						25							
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program B1 (%)																			25.98					
Predikat																			Tinggi					
<b>JUMLAH</b>									4,904,318,553	4,218,219,174	-	800,033,522	-	-	-	-	-	800,033,522	18.97	-			#DIV/0!	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH																			12.93	18.97				0.00
PREDIKAT																			Sedang					
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH																			71.63				0.00	
PREDIKAT																			Upaya Keras					

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2022 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Dinas Penanaman Modal Tahun 2018-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
  - a. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
  - b. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
  - c. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
  - d. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabpaten/ Kota
  - e. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - f. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Tidak terdapat Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Tidak terdapat Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan,

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung Tahun 2022, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena tingkat capaian kinerja dengan kategori **Sangat Baik** yaitu dengan nilai **99,81%** sedangkan realisasi fisik dan keuangan rata-rata penyerapannya adalah **73,68 %**. Hal tersebut didukung dengan data rata rata capaian kinerja sasaran strategis “**Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan**” yang terdiri dari 10 Indikator Kinerja Program .

Dari Tabel 2.1. dan Triwulan I tahun 2023 dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2023 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal**

### **2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)**

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.3  
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Penanaman Modal Triwulan I Tahun 2023  
Kabupaten Temanggung

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI 2018	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN TW I 2023	STATUS			CAPAIAN s.d TW I 2023 (%)	STATUS				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		TT	AT	UK		TT	AT	UK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
<b>A BIDANG : PENANAMAN MODAL</b>																								
		INDIKATOR SASARAN																						
		Indeks Kemudahan Berusaha	angka				60	62.5	65	n.a.	n.a	78	82	82	100	TT			100	TT				
		INDIKATOR PROGRAM																						
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai Realisasi Investasi	Milyar		300	360	432	520	625	375.6	1245.66	1496.68	1836.01	544.58	87.13		AT		87.13		AT			
			Nilai Investasi Tahun Berjalan					375.6	1245.66	1496.68	1836.01	544.58												
		Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi	%		10	10	10	10	10	18.75	28.13	28.13	28.13	28.13	28.13	100	TT			100	TT			
			Jumlah Potensi Investasi yang sudah dikaji					6	9	9	9	9												
		Jumlah seluruh potensi investasi					32	32	32	32	32													
		Persentase ketersediaan SDM bidang PM dan Perizinan yang terlatih	%		100	100	100	100	100	100	0	44.19	100.00	100.00	100.00	100	TT			100	TT			
			Jumlah SDM yang telah mengikuti pelatihan					77	0	19	20	20												
Jumlah SDM					77	40	43	20	20															

2	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan	%		100	100	100	100	100	60	60.0	60	100	100	100	TT			100	TT				
			Jumlah informasi yang akan disediakan									3	3	3	5	5								
			Jumlah peluang usaha sektor/bidang unggulan									5	5	5	5	5								
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelayanan perizinan online	%		100	100	100	100	100	46.2	98.48	98.35	98.09	100.00	100	TT			100	TT				
			Jumlah permohonan yang masuk melalui online									1272	2333	10124	11566	3223								
			Jumlah permohonan izin yang masuk									2753	2369	10294	11791	3223								
		Persentase perijinan yang bebas calo	%		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	TT			100	TT		
			Jumlah permohonan izin yang bebas calo									2753	2369	10294	11791	3223								
			Jumlah permohonan perizinan									2753	2369	10294	11791	3223								
		Persentase perizinan yang diterbitkan Tepat Waktu	%		95	95	95	95	95	81.21	96.20	100	100	100	100	100	TT			100	TT			
			Jumlah izin yang diterbitkan tepat waktu									1232	2279	10294	11791	3223								
			Jumlah pemohon izin yang diterbitkan									1517	2369	10294	11791	3223								
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan	%		100	100	100	100	100	100	93.37	93.53	100.00	100	100	TT			100	TT				
			Jumlah izin yang sesuai dengan pelaksanaan									110	155	159	164	19								
			Jumlah izin yang diterbitkan									110	166	170	164	19								
		Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	TT			100	TT		
			Jumlah pengaduan masyarakat									12	12	12	4	0								
			Terselesaikannya jumlah aduan									12	12	12	4	0								
		Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan	%		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	TT			100	TT		
			Jumlah tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan									0	0	0	0	0								
			Jumlah gugatan hukum									0	0	0	0	0								

JML INDIKATOR SASARAN	1	RATA-RATA CAPAIAN SASARAN	100	1	0	0	100	1	0	0
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM	10	RATA-RATA CAPAIAN PROGRAM	98.71	9	1	0	98.71	9	1	0
<b>JUMLAH SEMUA INDIKATOR</b>	<b>11</b>	<b>RATA-RATA CAPAIAN PD</b>	<b>99.36</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>99.36</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 10 terdiri dari:
  - a. Indeks Kemudahan Berusaha
    - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya regulasi regulasi baru yang mendorong Kemudahan Berusaha.
    - 2) Faktor penghambat Indikator tersebut masih adanya regulasi yang belum mendukung Kemudahan Berusaha.
    - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Pelayanan prima kepada investor / pelaku usaha yang masuk ke Kabupaten Temanggung
  - b. Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi
    - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah tersedianya dokumen kajian potensi investasi yang jelas dan terperinci.
    - 2) Faktor penghambat Indikator tersebut adalah masih adanya potensi potensi baru yang belum terdata.
    - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah sinergitas antara PD pelayanan perizinan dan investasi dengan PD teknis.
  - c. Persentase Persentase ketersediaan SDM bidang PM dan Perizinan yang terlatih
    - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah kesadaran masing masing SDM untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
    - 2) Faktor penghambat Indikator tersebut adalah keterbatasan waktu dan informasi pelaksanaan pelatihan SDM.
    - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah selalu meningkatkan kapasitas SDM dalam memberikan Pelayanan Prima.
  - d. Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan
    - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Masyarakat/investor membutuhkan informasi peluang usaha/bidang unggulan untuk dapat digunakan sebagai referensi dalam berinvestasi

- 2) Faktor penghambat Indikator tersebut adalah kesulitan dalam mendapatkan data peluang usaha yang mutakhir dikarenakan keterbatasan SDM
  - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Diseminasi informasi melalui berbagai media
- e. Persentase pelayanan perizinan online
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah perizinan sudah dilakukan secara online.
  - 2) Faktor penghambat Indikator tersebut adalah kurangnya informasi kepada masyarakat terkait perizinan online
  - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Memperluas informasi tata cara berizin melalui OSS
- f. Persentase perizinan bebas calo
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah perizinan sudah dilakukan secara online.
  - 2) Faktor penghambat Indikator tersebut adalah kurangnya informasi kepada masyarakat terkait perizinan online
  - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Memperluas informasi tata cara berizin melalui OSS
- g. Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah perizinan sudah dilakukan secara online.
  - 2) Faktor penghambat Indikator tersebut adalah kurangnya informasi kepada masyarakat terkait perizinan online
  - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Memperluas informasi tata cara berizin melalui OSS
- h. Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Kemudahan dalam pengurusan izin PBG/ IMB yang saat ini sudah online
  - 2) Faktor penghambat Indikator tersebut adalah kurangnya informasi kepada masyarakat terkait perizinan online
  - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Memperluas informasi tata cara berizin melalui OSS
- i. Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Pelayanan Prima dalam penanganan Pengaduan
  - 2) Faktor penghambat Indikator tersebut adalah kurangnya informasi kepada masyarakat terkait perizinan online
  - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah mempertahankan dan meningkatkan Pelayanan Prima kepada masyarakat.
- j. Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah tidak adanya gugatan hukum.
  - 2) Faktor penghambat Indikator tersebut tidak ada.
  - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Mitigasi pencegahan gugatan hukum
2. Capaian indikator dengan status akan tercapai ada 1 yaitu:
- a. indikator nilai realisasi investasi
    - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya regulasi regulasi baru yang mendorong Kemudahan Berusaha.
    - 2) Faktor penghambat Indikator tersebut adalah data yang tidak sesuai kondisi di lapangan.
    - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Pelayanan prima kepada investor / pelaku usaha yang masuk ke Kabupaten Temanggung, inovasi DPM menyapa, melalui pameran dan promosi investasi.
3. Tidak ada Capaian indikator dengan status upaya keras

### **2.2.2.Data Pokok**

#### **1. BIDANG PENANAMAN MODAL**

##### **a. Indeks Kemudahan Berusaha**

Perekonomian daerah dapat menjadi modal pembangunan daerah serta mewujudkan tujuan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perekonomi secara makro ditunjang oleh adanya usaha yang dilakukan oleh masyarakat sehingga bisa meningkatkan investasi dan penyerapan investasi. Hal ini diperlukan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas

dan berkelanjutan sesuai tujuan ke-3 RPJMD Kabupaten Temanggung 2018-2023. Peningkatan tersebut dapat ditingkatkan melalui intervensi pemerintah dalam mewujudkan kemudahan berusaha. Bahkan melalui UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi konsen pemerintah untuk dapat meningkatkan investasi sebagai penggerak aktivitas ekonomi di level nasional maupun daerah. Fokus kebijakan dalam penyederhanaan prosedur perijinan, digitalisasi proses, dan minimalisir biaya non operational. Menurut Pasal Penjelasan huruf C UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja “Kemudahan berusaha” adalah bahwa penciptaan kerja yang didukung dengan proses berusaha yang sederhana, mudah, dan cepat akan mendorong peningkatan investasi, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memperkuat perekonomian yang mampu membuka seluas-luasnya lapangan kerja bagi rakyat Indonesia”. Berdasarkan penjelasan tersebut maka terdapat fokus penjelasan kemudahan berusaha adalah ketika proses berusaha dapat berjalan secara sederhana secara prosedur, mudah secara akses dan cepat. Dengan tujuan kebijakan kemudahan berusaha melalui “Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila”.

Penghitungan Indeks kemudahan Berusaha dilaksanakan oleh pihak ke 3 (akademisi), namun dalam perhitungan tersebut indeks kemudahan berusaha menggunakan rentang angka maksimal 5, sedangkan pada Perubahan RPJMD rentang angka yang digunakan maksimal 100, maka untuk menyesuaikan hasil perhitungan yang diperoleh dikalikan 20.

**Tabel 2.4**  
**Indeks Kemudahan Berusaha**

NO	TAHUN	Indeks Kemudahan Berusaha
1	2018	n.a
2	2019	n.a
3	2020	n.a
4	2021	78
5	2022	78*

Sumber : DPM 2022 triwulan IV

Dari Tabel diatas dapat kita ketahui bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 tidak dapat ditampilkan Indeks Kemudahan Berusaha dikarenakan memang tidak pernah dilakukan pengukuran Indeks Kemudahan Berusaha, Indeks Kemudahan Berusaha merupakan indikator baru, dan baru dapat dilaksanakan pengukuran pada triwulan 4 Tahun 2021 dengan hasil yang diperoleh adalah 78, angka tersebut sudah melebihi target yang telah ditetapkan, pada tahun 2021 target Indeks Kemudahan Berusaha adalah pada angka 60, hal ini dikarenakan banyaknya regulasi yang mendukung kemudahan berusaha baik dari Pusat maupun Daerah. Sedangkan pada tahun 2022 indeks kemudahan berusaha masih dalam proses pengukuran.

#### **b. Nilai Realisasi Investasi**

Realisasi investasi adalah nilai modal yang dipergunakan investor dalam menanamkan usahanya di berbagai bidang usaha terbuka yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan.

Ruang Lingkup realisasi investasi meliputi realisasi investasi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.

Rumus nilai investasi pada tahun berjalan adalah penjumlahan dari realisasi investasi bidang usaha baru di tahun yang bersangkutan.

**Tabel 2.5**  
**Realisasi Investasi Tahun 2017-2022**

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Nilai investasi tahun berjalan	164,65	760,49	375,6	1.245,66	1.496,68	1.836,0
2	Nilai investasi PMDN				1.245,66	1.486,42	1.529,1
3	Nilai investasi PMA				0	10,26	306,9

Sumber : DPM 2022 triwulan IV

- Memperhatikan sajian data tabel diatas, dari tahun ke tahun realisasi investasi mengalami kenaikan. Angka kenaikan cukup signifikan tersaji pada tahun 2018 yakni sebesar Rp. 760,49 Milyar yang didorong oleh realisasi investasi pembangunan pabrik sepatu baru di wilayah Kecamatan Kranggan. Sedangkan di periode 2019 ini tercatat nilai realisasi investasi menurun dari tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 375,6 Milyar.
- Pada tahun 2020 nilai realisasi investasi sebesar Rp. 1.245,66 Milyar, kenaikan nilai realisasi investasi tersebut dikarenakan sejak bulan April 2020 terdapat aplikasi NSWI yang memuat data investasi UMK dan Non UMK secara keseluruhan, serta stimulant bantuan Presiden untuk UMKM membuat pengusaha bergerak aktif mengurus perizinan sehingga membuat laju investasi meningkat tajam sedangkan pada tahun 2019 belum ada aplikasi yang memuat data UMK, juga masih rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk mengurus perizinan.
- Pada tahun 2021 nilai realisasi investasi sebesar Rp. 1.496,68 Milyar.
- Pada tahun 2022 sampai dengan triwulan IV nilai investasi sebesar Rp. 1.836 Milyar dengan rincian Rp. 306, 9 Milyar PMA dan Rp. 1.529,1 Milyar PMDN

Data Dukungnya adalah realisasi investasi berdasarkan pencatatan realisasi investasi bidang usaha baru tahun berjalan yang tercatat di sistem OSS Pusat berdasarkan notifikasi perizinan.

**Tabel 2.6**  
**REKAPITULASI INVESTASI PMDN/PMA**  
**DI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022**

NO	BULAN	INVESTASI PMDN	INVESTASI PMA
1	Januari	69.372.740.000	0
2	Februari	84.259.772.855	17.233.818.238
3	Maret	452.018.743.322	52.000.000.000
4	April	145.546.747.697	163.841.108.031
5	Mei	67.583.531.427	10.625.000.000
6	Juni	87.746.838.458	0
7	Juli	100.534.750.804	0
8	Agustus	118.573.901.310	63.226.472.352
9	September	121.573.377.030	0
10	Oktober	59.389.660.563	0
11	November	76.519.304.187	0
12	Desember	163.850.172.231	0
	<b>Total Investasi</b>	<b>1.529.084.829.891</b>	<b>306.926.398.621</b>

Sumber : DPM 2022 triwulan IV

**c. Persentase Tersedianya Kajian Teknis Potensi Investasi**  
**Kajian Teknis** adalah kajian untuk menganalisa kelayakan suatu rencana investasi yang meliputi perkiraan biaya investasi, kapasitas produksi dan teknologi.

**Potensi Investasi** adalah kemampuan investasi yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan.

Ruang lingkup kegiatan ini meliputi aspek teknis, analisa kelayakan atau menghitung kelayakan.

Rumus untuk mendapatkan Persentase Tersedianya Kajian Teknis Potensi Investasi adalah Jumlah potensi Investasi yang sudah dikaji dibagi Jumlah seluruh Potensi Investasi dikali 100.

**Tabel 2.7**  
**Persentase Kajian Teknis Investasi Tahun 2017-2022**

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah potensi Investasi yang sudah diKaji	na	1	6	9	9	9
2	Jumlah potensi Investasi	na	32	32	32	32	32
	Persentase	na	3,1	15,63	9,38	0	0

Sumber : DPM 2022 triwulan IV

Dari data tersebut diatas untuk kegiatan pengkajian teknis investasi sampai dengan tahun 2020 telah terlaksana 9 kajian.

Pada tahun 2021 kegiatan kajian teknis investasi tidak dilaksanakan karena keterbatasan SDM dan adanya refocusing anggaran.

Sedangkan pada tahun 2022 sampai dengan triwulan IV belum dilaksanakan Kajian Teknis Potensi Investasi.

**Tabel 2.8**  
**Potensi Investasi di Kabupaten Temanggung**

<b>NO</b>	<b>POTENSI INVESTASI</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Albasia	Belum dikaji
2	Mahoni	Belum dikaji
3	Jati	Belum dikaji
4	Tembakau	Belum dikaji
5	Kelapa	Belum dikaji
6	Padi	Belum dikaji
7	Jagung	Belum dikaji
8	Hortikultura	Belum dikaji
9	Kopi	Sudah dikaji
10	Cabe	Belum dikaji
11	Bawang Putih	Sudah dikaji
12	Ketela/ Ubi Rambat / Jalar	Belum dikaji
13	Domba	Belum dikaji
14	Sapi	Belum dikaji
15	Ayam	Belum dikaji
16	Situs Liyangan	Belum dikaji
17	Candi Pringapus	Belum dikaji
19	Kawasan Wisata Terpadu Jumprit	Belum dikaji
20	Kawasan Terpadu Edu Tourism	Belum dikaji
22	Pikatan Water Park	Belum dikaji
23	Posong	Belum dikaji
24	Kledung Pass	Belum dikaji
25	Bukit Wagir Bawang	Sudah Dikaji
26	Curug Ponco Tunggal	Belum dikaji
27	Curug Surodipo	Sudah dikaji
28	Kawasan Wisata Bejen Tretep Wonobojo	Sudah dikaji
29	Bukit Kembang Arum	Sudah dikaji
30	UMKM Desa Bansari	Sudah dikaji
31	Rest Area Pringsurat	Sudah dikaji
32	Pengembangan Kawasan Kledung	Sudah dikaji

Sumber : DPM 2022 triwulan IV

Data dukung dari indikator ini adalah :

- Analisa Teknis Investasi
- Data-data yang sesuai dengan bidang yang akan dikaji
- Informasi dari masyarakat yang terkait dengan kajian investasi

**d. Persentase Ketersediaan SDM Bidang Penanaman Modal dan Perizinan yang terlatih**

Ketersediaan SDM Bidang Penanaman Modal dan Perizinan yang terlatih adalah ketersediaan SDM yang siap, mau dan mampu melaksanakan tugas dalam usaha pencapaian target investasi dan pelayanan perizinan.

Ruang lingkup dari kegiatan ini meliputi SDM PATEN dan SDM DPM.

Rumus dari indikator ini adalah Jumlah SDM ASN yang mengikuti pelatihan dibagi Jumlah SDM ASN dikali 100

**Tabel 2.9**  
**Persentase Ketersediaan SDM Bidang Penanaman Modal dan Perizinan yang terlatih Tahun 2017-2022**

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah SDM yang terlatih	139	77	77	0	19	20
2	Jumlah SDM	139	77	77	40	43	20
	Persentase	100	100	100	0	44,18	85.00

Sumber : DPM 2022 triwulan IV

Dari tabel diatas dapat dianalisa bahwa SDM yang mengikuti pelatihan bidang PM dan Perizinan dari tahun 2016 – 2019 sudah 100%. Pada tahun 2020 kegiatan pelatihan bidang PM dan Perizinan belum bisa dilaksanakan dikarenakan adanya wabah “Virus Corona”, untuk memutus rantai penyebaran virus tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan *Social* dan *Phisycal Distancing*, sehingga kegiatan yang melibatkan orang banyak tidak diperbolehkan.

Pada tahun 2021 kegiatan – kegiatan Pelatihan sudah mulai dilaksanakan walaupun dengan system daring namun dari 43 SDM bidang Penanaman Modan dan Perizinan pada tahun 2021 yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikat sebanyak 19 orang hal ini dikarenakan karena kurangnya informasi dan ketersediaan waktu untuk mengikuti pelatihan dari masing masing SDM. Pada tahun 2022 sampai dengan bulan Juni belum ada pelatihan yang dilaksanakan SDM bidang Penanaman Modal.

**Tabel 2.10**  
**Daftar SDM yang Memiliki Sertifikat Pelatihan**  
**Sampai dengan Tahun 2022**

No	Nama	Nomor Sertifikat
1	MANDA KARTIKO S.STP, M.Kom	IX/PUSBINDIKLATREN-MPWK FT UNDIP/PPP/X/2021
2	ARIF AGUNG SUSAPTO, SH, MM	892.1/10724.157/SO/2021
3	SOLEKHAH, S.AP	2591660/8-4881/LITDIG/2021
4	TITO SEJATI, SE	892.1/10724.142/SO/2021
5	KABUL SUGIONO, S.AP	892.1/10724.162/SO/2021
6	ALI MASYHADI, A.Md	216/PELATIHAN TOT OSS/B.3/A.1/2022
7	ARUM KURNIATI, S.H	227/PELATIHAN TOT OSS/B.3/A.1/2022
8	KUSUMA ARI SUSANTI, SE, MM	2586269/8-4881/LITDIG/2021
9	ERNA DWIASTUTI, SE, MM	892.1/0724.140/SO/2021
10	AGNIES AYU K, ST	892.1/0724.144/SO/2021
11	KURNIAWATI W. SH, MM	060/113/2022
12	MANGSUR MAHFUD, SM	060/115/2022
13	SUBAKIR	2585959/8-4881/LITDIG/2021
14	ZAENI, SM	060/116/2022
15	TRİYANTI, A.Md	060/117/2022
16	HERU SUBAGYO, SM	892.1/0724.161/SO/2021
17	IIS SUSANTI	060/114/2022
18	M. FAHMY HIDAYAT, SH	892.1/17457.2444/PED4/2022
19	SRI SUDARSIH, SE	892.1/17457.2445/PED4/2022
20	ELSA KARTIKA SARI, A.Md	892.1/17457.2443/PED4/2022

Sumber : DPM 2022 triwulan IV

**e. Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan**

Definisi : tersedianya informasi untuk masyarakat dunia usaha terkait dengan peluang investasi yang ada di Kabupaten Temanggung.

Ruang Lingkup : Sektor Pariwisata, sektor UMKM, sektor Pertanian, Perkebunan, sektor peternakan dan sektor perikanan.

Rumus Jumlah informasi yang akan disediakan dibagi jumlah peluang usaha sektor/bidang unggulan dikali 100%.

**Tabel 2.11**  
**Persentase tersedianya informasi peluang usaha**  
**sektor/bidang unggulan Tahun 2017-2022**

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah informasi yang disediakan	na	1	3	3	3	5
2	Jumlah peluang usaha sektor unggulan	na	6	5	5	5	5
	Persentase	na	16,67	60	60	60	100

Sumber : DPM 2022 triwulan IV

Untuk indikator persentase tersedianya informasi peluang usaha/ sektor bidang unggulan di tahun 2020 masih 60 % tersedia yaitu bidang Pariwisata, UMKM dan Pertanian, sedangkan pada tahun 2021 belum ada penambahan informasi peluang usaha di karenakan keterbatasan anggaran. Pada tahun 2022 Triwulan II jumlah peluang usaha yang sudah diinformasikan sudah 100 % dari jumlah Peluang usaha yang ada.

**Tabel 2.12**  
**Data Peluang Usaha**

No	Peluang Usaha	Sudah / Belum Diinformasikan	Keterangan
1	Sektor Pariwisata	Sudah	
2	Sektor UMKM	Sudah	
3	Sektor Pertanian/ Perkebunan	Sudah	
4	Sektor Peternakan	Sudah	
5	Sektot Perikanan	Sudah	

Sumber : DPM 2022 triwulan IV

#### **f. Persentase Pelayanan Perizinan On line**

Pelayanan Perizinan On line adalah pelayanan yang didasarkan/berbasis pada tehnologi, informasi yang mengintegrasikan perizinan di daerah dan pusat dalam rangka mempermudah kegiatan usaha di dalam negeri.

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui system elektronik yang terintegrasi.

Ruang lingkup indikator ini meliputi data perizinan dan non perizinan dan Perizinan yang sifatnya komersial.

Rumus indikator ini jumlah permohonan on line yang terlayani dibagi dengan jumlah permohonan on line yang masuk kali 100.

**Tabel 2.13**  
**Persentase Pelayanan Perizinan On Line**  
**Tahun 2017-2022**

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah permohonan on line yang terlayani	na	361	1.272	6.023	10.124	11,566
2	jumlah permohonan on line yang masuk	na	361	2.753	6.575	10.124	11,791
	Persentase	na	100	46,2	91,60	100	98.09

Sumber : DPM 2022 triwulan IV

Dari data diatas persentase pelayanan perizinan online pada tahun 2020 sebesar 91,60%. Kecenderungan perizinan online dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 meningkat karena selain perizinan berusaha yang melalui OSS juga ada perizinan selain izin berusaha yaitu melalui aplikasi *sicantik cloud* yang terus diusahakan penyempurnaan aplikasinya dengan tahapan pembuatan format izin yang belum pernah diterbitkan bisa dilayani secara online.

Pada tahun 2021 data perizinan on line Dinas Penanaman modal yang terlayani sudah mencapai 100 %. Hal ini dikarenakan setiap pengajuan perizinan secara online langsung terlayani oleh sistem.

Data dukung untuk indikator ini adalah data pemohon secara on line dan data keseluruhan permohonan izin.

Untuk tahun 2022 triwulan IV data perizinan online sebanyak 11.566 dari keseluruhan izin sebanyak 11.791 atau sebesar 98,09 %.

**Tabel 2.14**  
**Data Perizinan Online tahun 2022**

NO	JENIS IZIN	TOTAL		
		JUMLAH IZIN	IZIN ONLINE YANG TERBIT	PROSENTA SE IZIN ONLINE (%)
A. IZIN POKOK				
1	IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH	167	167	100.00
2	SITE PLANE	0	0	0.00
3	IMB/PBG	69	69	100.00
4	SLF	0	0	0.00
5	PEMECAHAN IMB	315	315	100.00
B. IZIN BIDANG USAHA				
6	NIB / TDP	8529	8529	100.00
7	SIUP	0	0	
8	TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)	1	1	100.00
9	IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)	0	0	0.00
10	IZIN PERLUASAN INDUSTRI (IPI)	0	0	0.00
11	SIUJK	0	0	0.00
12	TD USAHA PARIWISATA	0	0	0.00
13	IZIN ANGKUTAN PERUNTUKAN BARANG UMUM	0	0	0.00
14	IZIN TRAYEK	124	124	100.00
15	IZIN USAHA PETERNAKAN	0	0	0.00
16	IZIN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	0	0	0.00
17	IZIN KESEJAHTERAAN HEWAN	0	0	0.00
18	IZIN PENDIRIAN RUMAH SAKIT UMUM DAN KHUSUS	0	0	0.00
19	IZIN DOKTER HEWAN	3	3	100.00
20	IZIN PENYALUR DAN TOKO ALAT KESEHATAN	0	0	0.00
21	IZIN LABORATORIUM KLINIK	0	0	0.00
22	IZIN PENYELENGGARANAAN OPTIKAL	1	1	100.00
23	IZIN USAHA BIDANG PERIKANAN	0	0	0.00
24	IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME	390	165	42.31
25	TDI	0	0	0.00
26	IZIN PEMAKAMAN	0	0	0.00
27	IZIN PEMASANGAN KABEL UDARA	2	2	100.00
C. IZIN PROFESI				
28	SI Praktek Dokter, dr.Gigi, Dokter Spesialis	251	251	100.00
29	SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT	534	534	100.00

30	SI Kerja Perawat Gigi	0	0	0.00
31	SI Praktik Perawat Gigi	0	0	0.00
32	SI Kerja Bidan	0	0	0.00
33	SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN	538	538	100.00
34	SI Kerja Apoteker	0	0	0.00
35	SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER	46	46	100.00
36	SURAT IZIN KERJA RADIOGRAFER	8	8	100.00
37	SURAT IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN	2	2	0.00
38	SURAT IZIN KERJA FISIOTERAPI	30	30	100.00
39	SURAT IZIN PRAKTIK AHLI TEKNIK LABORATORIUM MEDIK	72	72	100.00
40	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN	33	33	100.00
41	SURAT IZIN PRAKTIK ELEKTROMEDIS	6	6	100.00
42	SURAT IZIN KERJA OKUPASI TERAPI	2	2	100.00
43	SURAT IZIN KERJA TERAPI WICARA	5	5	100.00
44	SURAT IZIN KERJA REKAM MEDIS	0	0	0.00
45	SURAT IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN	27	27	100.00
46	SURAT IZIN KERJA TENAGA GIZI	29	29	100.00
47	SURAT IZIN KERJA TEKNISI TRANFUSI DARAH	3	3	100.00
48	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL	0	0	0.00
49	SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT	0	0	0.00
50	SURAT IZIN KERJA TERAPIS GIGI DAN MULUT (SIKTGM)	13	13	100.00
51	SURAT IZIN KERJA AHLI PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	36	36	100.00
52	SURAT IZIN PRAKTIK PENATA ANESTESI (SIPPA)	12	12	100.00
53	SURAT IZIN PRAKTIK PSIKOLOG KLINIS - (SIPPK)	1	1	100.00
54	SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN INSEMINATOR/SARJANA KEDOKTERAN HEWAN (SIPP INSEMINATOR)	0	0	0.00
55	SURAT IZIN PRAKTIK FISIKAWAN MEDIK (SIPFM)	1	1	100.00
56	Surat Izin Praktik Akupuntur Terapis	1	1	100.00
D. IZIN OPERASIONAL		0		
57	IZIN KLINIK	1	1	100.00
58	IZIN APOTEK	1	1	100.00
59	IZIN TOKO OBAT	2	2	100.00
60	LAIK SEHAT	1	1	100.00

61	IZIN RADIOLOGI	0	0	0.00
62	LAIK SEHAT KATERING	0	0	0.00
63	LAIK SEHAT RUMAH MAKAN	0	0	0.00
64	SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI DAM	8	8	100.00
65	SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI SALON	0	0	0.00
66	IZIN HEMODIALISA	0	0	0.00
67	IZIN UNIT TRANFUSI DARAH	0	0	0.00
68	SPP-IRT	0	0	0.00
69	IZIN OPERASIONALRUMAH SAKIT UMUM DAN KHUSUS	0	0	0.00
70	IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS	0	0	0.00
71	SURAT TERDAFTAR PENYEHAAT TRADISIONAL (STPT)	80	80	100.00
72	IZIN OPERASIONAL SEKOLAH	24	24	100.00
73	OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN	421	421	100.00
74	IZIN KESEHATAN HEWAN BAGI PRAKTIK DOKTER HEWAN MANDIRI (SIVET)	2	2	100.00
75	IZIN TEMPAT USAHA PRAKTEK KESEHATAN HEWAN BAGI PRAKTIK DOKTER HEWAN	0	0	0.00
	JUMLAH	11,791	11,566	98.09

Sumber : DPM 2022 triwulan IV

**g. Persentase perizinan bebas calo :**

Perizinan bebas calo adalah pengurusan perizinan yang dilakukan secara mandiri, transparan antara pemohon dan petugas.

Ruang lingkup indikator untuk tercapainya perizinan yang bebas calo adalah SDM perizinan dan juga masyarakat.

Rumus indikator persentase perizinan bebas calo adalah Jumlah permohonan perizinan yang bebas calo dibagi permohonan perizinan kali 100.

**Tabel 2.15**  
**Persentase Permohonan Izin Bebas Calo**  
**Tahun 2017-2022**

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah permohonan Izin bebas calo	na	1912	2753	6575	10.294	11,791
2	Jumlah permohonan izin	na	1912	2753	6575	10.294	11,791
3	Persentase	na	100	100	100	100	100

Sumber : DPM 2022 triwulan IV

Dari data tersebut dapat dianalisa yaitu dari tahun 2018-2020 perizinan yang tepat waktu sudah mencapai 100% ini dikarenakan adanya dukungan kepada Tim seperti peraturan perundangan teknis Perangkat Daerah lain dan kualitas Sumber daya Manusia yang baik sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

Pada tahun 2021 izin yang diterbitkan tepat waktu sudah melampaui target yaitu 100% (target 95%). Hal ini dikarenakan ada perubahan SOTK yang baru dimana sudah ada pembagian tugas perzinan berusaha dan non perizinan berusaha sehingga lebih efektif.

Pada tahun 2022 triwulan IV data perizinan bebas Calo sebesar 100% dari permohonan izin sejumlah 11,791 permohonan.

Data Jumlah Perizinan Tepat Waktu sesuai dengan jenis izin dapat dilihat pada table di bawah ini.

**Tabel 2.16**  
**Data Perizinan Bebas Calo tahun 2022**

NO	JENIS IZIN	TOTAL		
		JUMLAH IZIN	IZIN BEBAS CALO	PROSENT ASE IZIN ONLINE (%)
A. IZIN POKOK				
1	IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH	167	167	100.00
2	SITE PLANE	0	0	0.00
3	IMB/PBG	69	69	100.00
4	SLF	0	0	0.00
5	PEMECAHAN IMB	315	315	100.00
B. IZIN BIDANG USAHA				
6	NIB / TDP	8529	8529	100.00
7	SIUP	0	0	
8	TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)	1	1	100.00
9	IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)	0	0	0.00
10	IZIN PERLUASAN INDUSTRI (IPI)	0	0	0.00
11	SIUJK	0	0	0.00
12	TD USAHA PARIWISATA	0	0	0.00
13	IZIN ANGKUTAN PERUNTUKAN BARANG UMUM	0	0	0.00
14	IZIN TRAYEK	124	124	100.00

15	IZIN USAHA PETERNAKAN	0	0	0.00
16	IZIN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	0	0	0.00
17	IZIN KESEJAHTERAAN HEWAN	0	0	0.00
18	IZIN PENDIRIAN RUMAH SAKIT UMUM DAN KHUSUS	0	0	0.00
19	IZIN DOKTER HEWAN	3	3	100.00
20	IZIN PENYALUR DAN TOKO ALAT KESEHATAN	0	0	0.00
21	IZIN LABORATORIUM KLINIK	0	0	0.00
22	IZIN PENYELENGGARANAAN OPTIKAL	1	1	100.00
23	IZIN USAHA BIDANG PERIKANAN	0	0	0.00
24	IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME	390	390	100,00
25	TDI	0	0	0.00
26	IZIN PEMAKAMAN	0	0	0.00
27	IZIN PEMASANGAN KABEL UDARA	2	2	100.00
C. IZIN PROFESI				
28	SI Praktek Dokter, dr.Gigi, Dokter Spesialis	251	251	100.00
29	SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT	534	534	100.00
30	SI Kerja Perawat Gigi	0	0	0.00
31	SI Praktik Perawat Gigi	0	0	0.00
32	SI Kerja Bidan	0	0	0.00
33	SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN	538	538	100.00
34	SI Kerja Apoteker	0	0	0.00
35	SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER	46	46	100.00
36	SURAT IZIN KERJA RADIOGRAFER	8	8	100.00
37	SURAT IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN	2	2	100.00
38	SURAT IZIN KERJA FISIOTERAPI	30	30	100.00
39	SURAT IZIN PRAKTIK AHLI TEKNIK LABORATORIUM MEDIK	72	72	100.00
40	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN	33	33	100.00
41	SURAT IZIN PRAKTIK ELEKTROMEDIS	6	6	100.00
42	SURAT IZIN KERJA OKUPASI TERAPI	2	2	100.00
43	SURAT IZIN KERJA TERAPI WICARA	5	5	100.00
44	SURAT IZIN KERJA REKAM MEDIS	0	0	0.00
45	SURAT IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN	27	27	100.00
46	SURAT IZIN KERJA TENAGA GIZI	29	29	100.00
47	SURAT IZIN KERJA TEKNISI TRANFUSI DARAH	3	3	100.00
48	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL	0	0	0.00
49	SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT	0	0	0.00
50	SURAT IZIN KERJA TERAPIS GIGI DAN MULUT (SIKTGM)	13	13	100.00

51	SURAT IZIN KERJA AHLI PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	36	36	100.00
52	SURAT IZIN PRAKTIK PENATA ANESTESI (SIPPA)	12	12	100.00
53	SURAT IZIN PRAKTIK PSIKOLOG KLINIS - (SIPPK)	1	1	100.00
54	SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN INSEMINATOR/SARJANA KEDOKTERAN HEWAN (SIPP INSEMINATOR)	0	0	0.00
55	SURAT IZIN PRAKTIK FISIKAWAN MEDIK (SIPFM)	1	1	100.00
56	Surat Izin Praktik Akupuntur Terapis	1	1	100.00
D. IZIN OPERASIONAL				
57	IZIN KLINIK	1	1	100.00
58	IZIN APOTEK	1	1	100.00
59	IZIN TOKO OBAT	2	2	100.00
60	LAIK SEHAT	1	1	100.00
61	IZIN RADIOLOGI	0	0	0.00
62	LAIK SEHAT KATERING	0	0	0.00
63	LAIK SEHAT RUMAH MAKAN	0	0	0.00
64	SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI DAM	8	8	100.00
65	SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI SALON	0	0	0.00
66	IZIN HEMODIALISA	0	0	0.00
67	IZIN UNIT TRANFUSI DARAH	0	0	0.00
68	SPP-IRT	0	0	0.00
69	IZIN OPERASIONALRUMAH SAKIT UMUM DAN KHUSUS	0	0	0.00
70	IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS	0	0	0.00
71	SURAT TERDAFTAR PENYEHAAT TRADISIONAL (STPT)	80	80	100.00
72	IZIN OPERASIONAL SEKOLAH	24	24	100.00
73	OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN	421	421	100.00
74	IZIN KESEHATAN HEWAN BAGI PRAKTIK DOKTER HEWAN MANDIRI (SIVET)	2	2	100.00
75	IZIN TEMPAT USAHA PRAKTEK KESEHATAN HEWAN BAGI PRAKTIK DOKTER HEWAN	0	0	0.00
JUMLAH		11,791	11,791	100.00

Sumber : DPM 2022 triwulan IV

#### h. **Persentase Perizinan yang diterbitkan Tepat Waktu**

Definisi dari penyelesaian perijinan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dengan prosedur dan syarat-syaratnya.

Ruang lingkup indikator ini adalah semua pemohon ijin sifatnya komersial dan non komersial.

Rumusnya adalah jumlah perizinan yang diterbitkan tepat waktu dibagi jumlah permohonan izin yang diterbitkan dikali 100.

**Tabel 2.17**  
**Persentase Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu**  
**Tahun 2017-2022**

NO	URAIAN	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Izin tepat waktu	910	1042	1232	6091	10.294	11,791
2	Jumlah permohonan izin yang diterbitkan	1665	1912	1517	6575	10.294	11,791
3	Persentase	54,65	54,5	49,28	92,64	100	100

Sumber : DPM 2022 triwulan IV

Dari data tersebut dapat dianalisa yaitu dari tahun 2017-2020 perizinan yang tepat waktu masih belum mencapai 95% ini dikarenakan adanya beberapa kendala teknis di Tim seperti peraturan perundangan teknis Perangkat Daerah lain dan kurangnya Sumber daya Manusia untuk melakukan verifikasi teknis juga dalam penerbitan izin harus melewati dua Kasi.

Pada tahun 2021 izin yang diterbitkan tepat waktu sudah melampaui target yaitu 100% (target 95%). Hal ini dikarenakan ada perubahan SOTK yang baru dimana sudah ada pembagian tugas perzinan berusaha dan non perizinan berusaha sehingga lebih efektif.

Pada tahun 2022 sampai triwulan III data perizinan tepat waktu mencapai 100% dari 8.173 permohonan izin yang dilayani.

Data Jumlah Perizinan Tepat Waktu sesuai dengan jenis izin dapat dilihat pada table di bawah ini.

**Tabel 2.18**  
**Data Perizinan Tepat Waktu Tahun 2022**

NO	JENIS IZIN	TOTAL		
		JUMLAH IZIN	IZIN BEBAS CALO	PROSENTASE IZIN ONLINE (%)
<b>A. IZIN POKOK</b>				
1	IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH	167	167	100.00
2	SITE PLANE	0	0	0.00
3	IMB/PBG	69	69	100.00
4	SLF	0	0	0.00
5	PEMECAHAN IMB	315	315	100.00
<b>B. IZIN BIDANG USAHA</b>				
6	NIB / TDP	8529	8529	100.00
7	SIUP	0	0	
8	TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)	1	1	100.00
9	IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)	0	0	0.00
10	IZIN PERLUASAN INDUSTRI (IPI)	0	0	0.00
11	SIUJK	0	0	0.00
12	TD USAHA PARIWISATA	0	0	0.00
13	IZIN ANGKUTAN PERUNTUKAN BARANG UMUM	0	0	0.00
14	IZIN TRAYEK	124	124	100.00
15	IZIN USAHA PETERNAKAN	0	0	0.00
16	IZIN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	0	0	0.00
17	IZIN KESEJAHTERAAN HEWAN	0	0	0.00
18	IZIN PENDIRIAN RUMAH SAKIT UMUM DAN KHUSUS	0	0	0.00
19	IZIN DOKTER HEWAN	3	3	100.00
20	IZIN PENYALUR DAN TOKO ALAT KESEHATAN	0	0	0.00
21	IZIN LABORATORIUM KLINIK	0	0	0.00
22	IZIN PENYELENGGARANAAN OPTIKAL	1	1	100.00
23	IZIN USAHA BIDANG PERIKANAN	0	0	0.00
24	IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME	390	390	100,00
25	TDI	0	0	0.00
26	IZIN PEMAKAMAN	0	0	0.00
27	IZIN PEMASANGAN KABEL UDARA	2	2	100.00
<b>C. IZIN PROFESI</b>				

28	SI Praktek Dokter, dr.Gigi, Dokter Spesialis	251	251	100.00
29	SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT	534	534	100.00
30	SI Kerja Perawat Gigi	0	0	0.00
31	SI Praktik Perawat Gigi	0	0	0.00
32	SI Kerja Bidan	0	0	0.00
33	SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN	538	538	100.00
34	SI Kerja Apoteker	0	0	0.00
35	SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER	46	46	100.00
36	SURAT IZIN KERJA RADIOGRAFER	8	8	100.00
37	SURAT IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN	2	2	100.00
38	SURAT IZIN KERJA FISIOTERAPI	30	30	100.00
39	SURAT IZIN PRAKTIK AHLI TEKNIK LABORATORIUM MEDIK	72	72	100.00
40	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN	33	33	100.00
41	SURAT IZIN PRAKTIK ELEKTROMEDIS	6	6	100.00
42	SURAT IZIN KERJA OKUPASI TERAPI	2	2	100.00
43	SURAT IZIN KERJA TERAPI WICARA	5	5	100.00
44	SURAT IZIN KERJA REKAM MEDIS	0	0	0.00
45	SURAT IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN	27	27	100.00
46	SURAT IZIN KERJA TENAGA GIZI	29	29	100.00
47	SURAT IZIN KERJA TEKNISI TRANFUSI DARAH	3	3	100.00
48	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL	0	0	0.00
49	SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT	0	0	0.00
50	SURAT IZIN KERJA TERAPIS GIGI DAN MULUT (SIKTGM)	13	13	100.00
51	SURAT IZIN KERJA AHLI PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	36	36	100.00
52	SURAT IZIN PRAKTIK PENATA ANESTESI (SIPPA)	12	12	100.00
53	SURAT IZIN PRAKTIK PSIKOLOG KLINIS - (SIPPK)	1	1	100.00
54	SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN INSEMINATOR/SARJANA KEDOKTERAN HEWAN (SIPP INSEMINATOR)	0	0	0.00
55	SURAT IZIN PRAKTIK FISIKAWAN MEDIK (SIPFM)	1	1	100.00
56	Surat Izin Praktik Akupuntur Terapis	1	1	100.00
D. IZIN OPERASIONAL				

57	IZIN KLINIK	1	1	100.00
58	IZIN APOTEK	1	1	100.00
59	IZIN TOKO OBAT	2	2	100.00
60	LAIK SEHAT	1	1	100.00
61	IZIN RADIOLOGI	0	0	0.00
62	LAIK SEHAT KATERING	0	0	0.00
63	LAIK SEHAT RUMAH MAKAN	0	0	0.00
64	SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI DAM	8	8	100.00
65	SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI SALON	0	0	0.00
66	IZIN HEMODIALISA	0	0	0.00
67	IZIN UNIT TRANFUSI DARAH	0	0	0.00
68	SPP-IRT	0	0	0.00
69	IZIN OPERASIONALRUMAH SAKIT UMUM DAN KHUSUS	0	0	0.00
70	IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS	0	0	0.00
71	SURAT TERDAFTAR PENYEHAAT TRADISIONAL (STPT)	80	80	100.00
72	IZIN OPERASIONAL SEKOLAH	24	24	100.00
73	OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN	421	421	100.00
74	IZIN KESEHATAN HEWAN BAGI PRAKTIK DOKTER HEWAN MANDIRI (SIVET)	2	2	100.00
75	IZIN TEMPAT USAHA PRAKTEK KESEHATAN HEWAN BAGI PRAKTIK DOKTER HEWAN	0	0	0.00
	JUMLAH	11,791	11,791	100.00

Sumber : DPM 2022 triwulan IV

**i. Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan**

**Pengawasan** adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal, termasuk penggunaan fasilitas Penanaman Modal.

**Pengendalian** adalah kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan terhadap Penanam Modal yang telah mendapatkan perizinan Penanaman Modal agar pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ruang lingkup indikator ini adalah izin yang diterbitkan.

Rumus Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan adalah Jumlah izin yang sesuai dengan pelaksanaan dibagi dengan jumlah izin yang diterbitkan kali 100.

**Tabel 2.19**  
**Persentase Kesesuaian Perizinan Tahun 2017-2022**

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah izin yang sesuai dengan pelaksanaan	na	173	110	155	159	164
2	Jumlah izin yang diterbitkan	na	174	110	166	170	164
	Persentase	na	99,43	100	93,37	93,53	100

Sumber : DPM 2022 triwulan IV

Pada Tahun 2019 telah dilaksanakan kegiatan pantauan terhadap kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan sejumlah 110 kegiatan Perizinan, atas hasil pengawasan dan pengendalian tersebut bahwa seluruh Perizinan di Kabupaten Temanggung telah melaksanakan kepatuhan dengan prosentase 100% terhadap kesesuaian pelaksanaan perizinan di lapangan dengan izin yang telah diterbitkan.

Pada tahun 2020 pelaksanaan perizinan baru mencapai 93,37%, hal ini disebabkan karena ada IMB yang ditetapkan di akhir bulan Desember, sementara kegiatan diakhir tahun sudah tidak ada. Selanjutnya dalam rangka pengawasan dan pengendalian untuk izin yang telah diterbitkan akan diverifikasi lapangan di tahun berikutnya.

Pada tahun 2021 kesesuaian perizinan terutama IMB baru mencapai 93,53%, hal ini dikarenakan dari 170 permohonan terdapat 11 permohonan yang tidak sesuai dengan pengajuan izin serta belum ada kesadaran masyarakat atau kurangnya sosialisasi Perda Nomor 11 tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2022 telah dilaksanakan Pengawasan dan Pengendalian terhadap 164 izin yang diterbitkan, dari 164 izin yang telah diterbitkan tersebut kondisi di lapangan sesuai dengan izin yang diajukan

#### j. **Persentase Pengaduan Masyarakat yang terselesaikan**

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyediakan sarana pengaduan untuk penanganan pengaduan pelayanan publik dan setiap penyelenggara pelayanan publik wajib memberi tugas kepada petugas penanganan yang kompeten untuk melaksanakan fungsi pengelolaan pengaduan.

Pengaduan Masyarakat adalah bentuk dari sebuah pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada aparatur pemerintah, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun. Pengaduan dapat dilakukan oleh setiap orang yang melihat atau mengetahui adanya ketidaksesuaian standar proses perizinan atau ketidaksesuaian komitmen Pelaku usaha terhadap izin yang sudah dikeluarkan oleh DPM. Pengaduan masyarakat dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung antara lain melalui surat aduan, kotak aduan, melalui website DPM, dan sms gateway. DPM telah membentuk Tim Penanganan Pengaduan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Temanggung Tahun 2018 melalui Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 034 Tahun 2018.

Ruang lingkup data ini adalah pengelolaan aduan.

Rumus indikator ini adalah Jumlah Pengaduan masyarakat yang terselesaikan dibagi dengan jumlah aduan kali 100.

**Tabel 2.20**  
**Persentase Pengaduan Masyarakat yang Terselesaikan**  
**Tahun 2017-2022**

No	Uraian	tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Pengaduan terselesaikan	na	34	12	12	12	4
2	Jumlah Pengaduan	na	34	12	12	12	4
	Persentase	na	100	100	100	100	100

Sumber : DPM 2022 triwulan IV

Sesuai dengan data tabel diatas, pada tahun 2017 tidak terdapat satupun pengaduan masyarakat. Dalam analisa DPM Kabupaten Temanggung, keadaan tersebut terjadi karena minimnya sarana pengaduan pada lembaga pelayanan publik yang ada di Pemerintah Kabupaten Temanggung pada saat itu, sehingga masyarakat tidak tahu kemana mereka harus melakukan pengaduan terhadap kegiatan penanaman modal yang ada.

Pada Tahun 2018 Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung melakukan pembenahan dan melengkapi sarana dan prasarana pengaduan dengan membuat Ruang Pengaduan, menetapkan petugas penanganan pengaduan, membuat SOP Pengaduan, menerapkan system pengaduan secara langsung maupun tidak langsung, secara online dan secara offline, kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait perbaikan system pengaduan. Sehingga pada tahun 2018 terdapat data pengaduan yang masuk ke DPM Kabupaten Temanggung sejumlah 34 pengaduan masyarakat. Menurut Pengaduan masyarakat yang masuk pada Tahun 2018, prosentase terbesar adalah terkait dengan pelanggaran pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang sudah mendapatkan izin atau belum mendapatkan izin dari DPM Kabupaten Temanggung, bukan dari kualitas pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh petugas pelayanan publik pada DPM kabupaten temanggung. Sejumlah 34 Pengaduan yang masuk ke DPM semuanya sudah diselesaikan dalam kurun waktu tahun yang sama. DPM membentuk Tim Penanganan pengaduan melalui Surat Keputusan Bupati yang terdiri dari Gabungan OPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Temanggung, sehingga penyelesaian Pengaduan masyarakat dapat segera terselesaikan oleh tim penanganan pengaduan. Melihat jumlah pengaduan pada tahun yang masuk pada Tahun 2018 sangat signifikan bila dibandingkan dengan 2017, hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi keberhasilan perubahan dan penambahan sarana prasarana, dan sistem pada lembaga pelayanan publik di Kabupaten Temanggung,

sehingga masyarakat bisa dengan mudah dan berani melakukan pengaduan masyarakat.

Pada Tahun 2019 Pengaduan di Kabupaten Temanggung yang masuk sejumlah 12 pengaduan dan pengaduan tersebut sudah diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan yang tertuang dalam berita acara penanganan pengaduan. Pada tahun 2019 Tim Penanganan Pengaduan juga sudah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Temanggung sehingga Pengelolaan pengaduan di Kabupaten Temanggung sudah mempunyai standar dan prosedur yang jelas dalam menangani pengaduan. Prosedur dan standar pengelolaan pengaduan.

Pada tahun 2020 jumlah aduan yang masuk 12 pengaduan dan aduan tersebut dapat diselesaikan. pada tahun 2021 pengaduan di Kabupaten Temanggung yang masuk sejumlah 12 pengaduan dan pengaduan tersebut telah diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan, sedangkan pada tahun 2022 triwulan I jumlah aduan yang masuk sejumlah 2 pengaduan, pada Triwulan II tidak ada aduan yang masuk, Sedangkan pada Triwulan III ada 2 aduan yang masuk sedangkan pada triwulan IV tidak ada aduan yang masuk.

Data Rekap pengaduan tahun 2022 yang masuk dan tertangani dapat di lihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.21**  
**Rekap Pengaduan Tahun 2022**

No	Tanggal Aduan	Nama	Tanggal Monev	Ket
1	14 Februari 2022	SUPARNO	17 Februari 2022	
2	14 Februari 2022	Warga RT 01/RW 05 Desa Bansari, Kec. Bansari	23 Februari 2022	
3	18 Juli 2022	Yusuf Darmawan	1 Agustus 2022	
4	29 Juli 2022	Manis Sayuti	1 Agustus 2022	

Sumber : DPM 2022 triwulan IV

#### **k. Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan**

Definisi Gugatan hukum adalah permasalahan baik pidana, perdata maupun Tata Usaha Negara yang mengandung

sengketa antara 2 (dua) pihak atau lebih yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara dimana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat.

Keputusan Tata Usaha Negara merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Biasanya, bagi orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan atas keputusan tersebut, mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun berdasarkan atas pelaksanaan salah satu kegiatan penanaman modal di Kabupaten Temanggung.

Ruang Lingkup gugatan terhadap perizinan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal.

Rumus Jumlah tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan di bagi jumlah gugatan dikali 100%.

**Tabel 2.22**  
**Persentase Tertanganinya Gugatan Hukum Di Dalam Pengadilan Tahun 2017-2022**

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan	1	1	0	0	0	0
2	Jumlah gugatan hukum	1	1	0	0	0	0
	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber : DPM 2022 triwulan IV

Berdasarkan data diatas dapat dilihat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 terdapat 1 gugatan hukum dan dapat diselesaikan di dalam pengadilan. Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 triwulan IV tidak ada gugatan hukum yang masuk ke Dinas Penanaman Modal.

### 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Dinas Penanaman Modal dari 11 indikator sampai dengan tahun 2022 masih terdapat 1 indikator yang belum mencapai target 100 %, yaitu:

- Indikator Pelayanan Perizinan Online

Hal ini disebabkan karena masih ada pelayanan perizinan yang masih dilakukan secara offline yaitu izin penyelenggaraan reklame , untuk melaksanakannya secara online perlu dibangun sebuah Aplikasi Izin Penyelenggaraan Reklame online yang saat ini belum dapat dibangun karena keterbatasan anggaran .

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, antara lain :

- Alokasi Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan belum mencukupi
- Belum semua kewenangan dan personil untuk melakukan verifikasi teknis ada di DPM
- Belum Banyak Investasi yang masuk ke komoditas unggulan daerah.
- Persebaran Investasi yang belum merata baik sektor maupun Wilayah
- Kualitas Pelayanan Perizinan yang masih perlu ditingkatkan
- Pengelolaan data belum mutakhir

Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan agar

- Peningkatan dan pemenuhan kebutuhan anggaran dilakukan
- Pelimpahan regulasi kewenangan dan disertai penyerahan personil pendukung atau SDM nya

- Melakukan promosi investasi secara rutin terkait komoditas unggulan dan potensi investasi di wilayah kabupaten Temanggung
- Meningkatkan Pelayanan Perizinan dengan pengadaan Mal Pelayanan Publik
- Pengelolaan data secara mutakhir

#### **2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD**

*Review* atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah terdapat penambahan Anggaran kegiatan di luar rancangan awal Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) pada kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik untuk Pengadaan Mal Pelayanan Publik (MPP)

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.23 berikut:

Tabel 2.23

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2024

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ketera ngan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
1	PENANAMAN MODAL						1	PENANAMAN MODAL						
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	264	Orang/bulan	2.265.680.094,00	a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	264	Orang/bulan	2.265.680.094,00	
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
a	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	300	Orang	223.221.000,00	a	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	300	Orang	223.221.000,00	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah						3	Administrasi Umum Perangkat Daerah						
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan	12	Paket	6.000.000,00	a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan	12	Paket	6.000.000,00	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ketera ngan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
			Kantor yang Disediakan							Kantor yang Disediakan				
b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	Paket	30.000.000,00	b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	Paket	30.000.000,00	
c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60	Paket	30.000.000,00	c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60	Paket	30.000.000,00	
d	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	140	Laporan	35.000.000,00	d	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	140	Laporan	35.000.000,00	
e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	30.000.000,00	e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	30.000.000,00	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	120	Laporan	4.500.000,00	a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	120	Laporan	4.500.000,00	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ketera ngan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	90.000.000,00	b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	90.000.000,00	
c	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	15.000.000,00	c	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	15.000.000,00	
d	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	454.553.880,00	d	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	454.553.880,00	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Temanggung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14	Unit	60.000.000,00	a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Temanggung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14	Unit	60.000.000,00	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ketera ngan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
b	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	Unit	25.000.000,00	b	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	Unit	25.000.000,00	
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	7	Unit	20.000.000,00	c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	7	Unit	20.000.000,00	
B	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL							PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL						
1	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota						1	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota						
a	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	1	Dokumen	20.000.000,00	a	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	1	Dokumen	20.000.000,00	
C	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL							PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL						
1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ketera ngan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
a	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	1	Dokumen	60.000.000,00	a	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	1	Dokumen	60.000.000,00	
D PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL							PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL							
1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota						1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota						
a	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Temanggung	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	3000	Pelaku Usaha	340.000.000,00	a	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Temanggung	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	3000	Pelaku Usaha	3.340.000.000,00	Ada Penambah an sebesar 3.000.000. 000 untuk pengadaan MPP
b	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Temanggung	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha	100	Pelaku Usaha	10.000.000,00	b	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Temanggung	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha	100	Pelaku Usaha	10.000.000,00	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ketera ngan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
			melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik							melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				
E	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL							PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL						
1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						
a	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Temanggung	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasik an Kegiatan Usahanya	10	Kegiatan Usaha.	60.000.000,00	a	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Temanggung	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasik an Kegiatan Usahanya	10	Kegiatan Usaha.	60.000.000,00	
b	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kab. Temanggung	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementas i Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha	150	Pelaku Usaha	325.200.000,00	b	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kab. Temanggung	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementas i Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha	150	Pelaku Usaha	325.200.000,00	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ketera ngan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
			Berbasis Risiko							Berbasis Risiko				
c	Pengawasan Penanaman Modal	Kab. Temanggung	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	10	Kegiatan Usaha	40.000.000,00	c	Pengawasan Penanaman Modal	Kab. Temanggung	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	10	Kegiatan Usaha	40.000.000,00	
F	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL							PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL						
1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ketera ngan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
a	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Temanggung	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatka n	1	Dokumen	10.000.000,00	a	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Temanggung	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatka n	1	Dokumen	10.000.000,00	
						<b>4.154.154.974,00</b>							<b>7.154.154.974,00</b>	

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

## 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Dinas Penanaman Modal.

Tabel 2.24

### Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
			<b>NIHIL</b>		

## 2.6. Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal ada 1 Inovasi sebagaimana tabel... berikut:

Tabel 2.25

### Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2020-2022

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
1	DPM Menyapa (Mendampingi Pembuatan NIBnya Pelaku Usaha)	DPM	APBD	Melakukan Pendampingan Pembuatan NIB di Kecamatan-Kecamatan, Pasar, dan Komunitas Pelaku Usaha	NIB bagi Pelaku Usaha	Meningkatnya Kepemilikan NIB bagi Pelaku Usaha di Temanggung	DPM tahun 2022

## 2.7. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, tidak ada Penghargaan yang diterima oleh Dinas Penanaman Modal sebagaimana tabel 2.26 berikut :

Tabel 2.26

### Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2022

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
		<b>NIHIL</b>		

### BAB III

## TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

### 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh Dinas Penanaman Modal lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal

Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Tujuan Pembangunan Yang Ingin Dicapai oleh Kabupaten Temanggung yaitu **Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan**.

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2024, maka tujuan dari penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal Tahun 2024 adalah **Meningkatkan Perekonomian Daerah**.

Dalam rangka mencapai tujuan perlu ditetapkan suatu Sasaran. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Dinas Penanaman Modal diperlukan sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2024. Adapun sasaran dari penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal Tahun 2024 ini adalah **Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan**.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Dinas Penanaman Modal Kab. Temanggung pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1.  
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja  
Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung Tahun 2024

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2024	TARGET KONDISI AKHIR 2024
Meningkatnya Perekonomian Daerah	Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pertumbuhan realisasi investasi	%	2,5	2,5
		Program Promosi Penanaman Modal				
		Program Pelayanan Penanaman Modal				
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal				

Sumber : Renstra Dinas Penanaman Modal Kab. Temanggung Tahun 2024-2026.

Kebijakan dan strategi Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung di Tahun 2024 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Dinas Penanaman Modal Tahun 2024-2026. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal Tahun 2024-2026.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

#### **4.1. Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung di Tahun 2024 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal Tahun 2024 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2024 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2024.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Dinas Penanaman Modal Tahun 2024 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.  
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan  
Dinas Penanaman Modal Kab. Temanggung Tahun 2024

RANCANGAN RENJA Dinas Penanaman Modal TAHUN 2024			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024			( + / - )
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
<b>A</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>		<b>A</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>		
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		
<b>a</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>a</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.265.680.094		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.265.680.094	
<b>b</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>b</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	223.221.000		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	223.221.000	
<b>c</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>c</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000	
	Penyediaan Bahan logistic Kantor	30.000.000		Penyediaan Bahan logistic Kantor	30.000.000	
	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	30.000.000		Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	30.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	35.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	35.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000	
<b>d</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah</b>		<b>d</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah</b>		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	15.000.000		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	15.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	454.553.880		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	454.553.880	

<b>e</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	60.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000
	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	
<b>a</b>	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	20.000.000
<b>3</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	
<b>a</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten /Kota</b>	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000
<b>4</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	
<b>a</b>	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	3.340.000.000
	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	10.000.000
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	
<b>a</b>	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota</b>	

<b>e</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	50.000.000	-10.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000	
	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>		
<b>a</b>	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>		
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	20.000.000	
<b>3</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>		
<b>a</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten /Kota</b>		
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000	
<b>4</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>		
<b>a</b>	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	3.340.000.000	
	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	10.000.000	
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>		
<b>a</b>	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota</b>		

	Penyelesaian permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	60.000.000		Penyelesaian permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	50.000.000	-10.000.000
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	325.200.000		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	325.200.000	
	Pengawasan Penanaman Modal	40.000.000		Pengawasan Penanaman Modal	40.000.000	
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>			<b>6</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	
<b>a</b>	<b>Pengelolaan Data dan Informasi perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Kabupaten/Kota</b>			<b>a</b>	<b>Pengelolaan Data dan Informasi perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Kabupaten/Kota</b>	
	Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10.000.000		Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10.000.000	
	<b>JUMLAH</b>	<b>7.154.154.974</b>		<b>JUMLAH</b>	<b>7.134.154.974</b>	<b>-20.000.000</b>

Sumber : SIPD RI RKPD Kab. Temanggung Tahun 2024

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa terjadi penurunan pagu indikatif Tahun 2024 sebesar Rp. 20.000.000,- (Duapuluh Juta Rupiah) yang terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :

1. Pengurangan Pagu Indikatif pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
2. Pengurangan Pagu Indikatif pada sub kegiatan Penyelesaian permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)

Tabel 4.2  
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal Kab. Temanggung  
Tahun 2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
	Dinas Penanaman Modal									7.134.154.974,00				4.174.925.748,00			
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									7.134.154.974,00				4.174.925.748,00			
2	18									7.134.154.974,00				4.174.925.748,00			
2	18	01								3.278.954.974,00				3.305.399.748,00			
										100%							
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.265.680.094,00			2.277.008.494,00			
2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
						-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	264 Orang/bulan	-	2.265.680.094,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	264 Orang/bulan	2.277.008.494,00
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						223.221.000,00			224.337.105,00			
2	18	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan												
						-	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	300 Orang	-	223.221.000,00	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300 Orang	224.337.105,00
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						131.000.000,00			131.655.000,00			
2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
						-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Paket	-	6.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	6.030.000,00
2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												

RENJA 2024 | DINAS PENANAMAN MODAL

						-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	- Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso	-	60 Paket	-	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	30.150.000,00
2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
						-	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	- Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso	-	60 Paket	-	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60 Paket	30.150.000,00
2	18	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
						-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	140 Laporan	-	35.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	140 Laporan	35.175.000,00
2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	30.150.000,00
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								564.053.880,00					566.874.149,00
							Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				12 laporan							
2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	120 Laporan	-	4.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	120 Laporan	4.522.500,00
2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	- Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso	-	12 Laporan	-	90.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	90.450.000,00
2	18	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	- Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso	-	12 Laporan	-	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	15.075.000,00
2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	454.553.880,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	456.826.649,00
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								95.000.000,00					105.525.000,00
							Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara				22 unit							

RENJA 2024 | DINAS PENANAMAN MODAL

2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
						-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	14 Unit	-	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	60.300.000,00	
2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
						-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	- Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso	-	1 Unit	-	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.125.000,00	
2	18	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	7 Unit	-	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	20.100.000,00	
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL							20.000.000,00							20.100.000,00
						Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor unggulan				100%									
						presentase perusahaan yang bermitra				50%									
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota							20.000.000,00							20.100.000,00
							Jumlah terlaksananya media promosi investasi				1 Jenis								
2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota														
						-	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20.100.000,00	
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL							60.000.000,00							60.300.000,00
						presentase promosi penanaman modal				25%									
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							60.000.000,00							60.300.000,00
							Jumlah Promosi Penanaman Modal tingkat Provinsi / Nasional yang diikuti				1 Kegiatan								
2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														

RENJA 2024 | DINAS PENANAMAN MODAL

						-	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	-	- Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	60.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	60.300.000,00
2	18	04					PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL						3.350.000.000,00				351.750.000,00
							Persentase Pelayanan Perizinan secara Elektronik			100%							
							Persentase Perizinan yang diterbitkan tepat waktu			100%							
							Persentase Pengaduan masyarakat yang tertangani			100%							
2	18	04	2.01				Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota						3.350.000.000,00				351.750.000,00
									Jumlah Pelayanan Konsultasi, Informasi dan Pengaduan yang dilaksanakan dan Jumlah permohonan perizinan dan non perizinan yang dilayani		3100 pelayanan						
2	18	04	2.01	0006			Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik										
								Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3000 Pelaku Usaha	-	3.340.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	3000 Pelaku Usaha	341.700.000,00
2	18	04	2.01	0007			Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko										
								Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	100 Pelaku Usaha	-	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	100 Pelaku Usaha	10.050.000,00
2	18	05					PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL						415.200.000,00				427.326.000,00
							presentase pengendalian penanaman modal			100%							

RENJA 2024 | DINAS PENANAMAN MODAL

2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							415.200.000,00					427.326.000,00	
								Jumlah Pelaku Usaha wajib LKPM yang telah menyampaikan LKPM					50 Pelaku Usaha					
2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya													
						-	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	-	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	10 Kegiatan Usaha.	50.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	10 Kegiatan Usaha.	60.300.000,00	
2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha													
						-	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	-	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	150 Pelaku Usaha	325.200.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	150 Pelaku Usaha	325.826.000,00	
2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal													
						-	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	-	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	10 Kegiatan Usaha	40.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	10 Kegiatan Usaha	40.200.000,00	
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL							10.000.000,00						10.050.000,00
							presentase Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal			100%								
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							10.000.000,00						10.050.000,00
								Jumlah Dokumen Pelaporan Data dan Informasi					1 Dokumen					

				Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	10.050.000,00	
							TOTAL	7.134.154.974,00				4.174.925.748,00

Temanggung, 3 Juli 2023  
 Kepala Dinas Penanaman Modal  
 Kabupaten Temanggung



**MANDA KARTIKO, S.STP, M.Kom**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19790412 199711 1 002

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2024 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Dinas Penanaman Modal untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Dinas Penanaman Modal Tahun 2024 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Dinas Penanaman Modal itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Penanaman Modal dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Dinas Penanaman Modal Tahun 2024 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2022. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinas Penanaman Modal Tahun 2024 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2024 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri dari Belanja Langsung sebesar **62,08** %, realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar **92,79** %, sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2024 Dinas Penanaman Modal mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar **Rp. 7.134.154.974,-** yang terdiri dari 6 program antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal Tahun 2024 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 3 Juli 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal  
Kabupaten Temanggung



**MANDA KARTIKO, S.STP, M.Kom**

Pembina Tingkat I

NIP. 19790412 199711 1 002